

Judul : Panitia angket: Presiden tetap menolak masuk wilayah DPR
Tanggal : Jumat, 22 September 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

PANITIA ANGKET

Presiden Tetap Menolak Masuk Wilayah DPR

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak akan mencampuri Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi karena hal itu masuk wilayah DPR. Sikap ini kembali ditegaskan Presiden terkait keinginan Panitia Angket untuk bertemu guna menjelaskan temuannya dan tujuan angket digulirkan.

"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR, semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR. Sudah," kata Presiden saat ditanya apakah ada waktu khusus untuk bertemu Panitia Angket DPR di Jakarta, Rabu (20/9).

Wakil Ketua Panitia Angket Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya telah menyurati pimpinan DPR untuk meminta pimpinan DPR melayangkan surat kepada Presiden guna mengagendakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Panitia Angket dengan Presiden. Namun, permintaan ini disikapi berbeda oleh unsur pimpinan DPR (*Kompas*, 20/9).

Pernyataan untuk tidak mau mencampuri angket DPR terhadap KPK telah beberapa kali disampaikan Presiden. Jawaban serupa juga disampaikan Presiden terkait dinamika di internal KPK yang terlihat dari langkah Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman melaporkan penyidik senior KPK Novel Baswedan ke kepolisian. "Saya tidak ingin mencampuri, nanti ada yang *ngomong* intervensi. Jadi tolong betul-betul dilihat, ini wilayahnya legislatif, ini wilayahnya KPK," tutur Presiden (*Kompas*, 2/9).

Penjelasan

Pada Rabu (20/9), Panitia Angket memanggil KPK untuk mengklarifikasi sejumlah temu-

an. Namun, pimpinan KPK menolak datang dengan alasan masih menunggu hasil uji materi terkait legalitas pansus angket di Mahkamah Konstitusi.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, ketidakhadiran KPK tidak merugikan Panitia Angket. Menurut dia, yang akan dirugikan justru KPK karena akan dianggap sebagai institusi yang tidak mematuhi undang-undang serta membangkang terhadap DPR.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai, panitia tidak perlu lagi mengundang KPK. Apalagi sampai menggunakan kewenangan seperti diatur di UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu memanggil paksa dengan bantuan kepolisian jika hingga panggilan ketiga, pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan. "Namun, jangan salahkan panitia kalau nantinya rekomendasi panitia menjadi sepihak," katanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, KPK menghormati DPR secara kelembagaan. "Namun, KPK juga mempertimbangkan aspek hukum lainnya. Mulai dari UUD 1945, UU No 17/2014, dan juga Tata Tertib DPR yang semuanya masuk dalam materi yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi saat ini," katanya.

Sebagian hal yang dipermasalahkan Panitia Angket, kata Febri, juga sudah dijawab saat rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR. Hal itu antara lain terkait pengelolaan barang rampasan dan sitaan serta perlindungan saksi.

(*/INA/MDN/AGE/APA/IAN)